

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Anny Widiasmara ¹⁾

Universitas PGRI MAdiun

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 2 No. 1
Januari - Mei 2019
Hlm.: 45-56

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

Keywords:
Capital Expenditures,
Regional Original income
(PAD), General Allocation
Funds (DAU), special
Allocation Funds (DAK),
Total assets, Area, Economic
Growth

JEL Classification code:
C12, C83, H54, H72, H83

Abstract

The research aims to empirically examine the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds, total assets, total area, and on capital expenditures in provinces in Indonesia in 2014-2016, and economic growth as moderating variables in explaining their relation. The data is obtained from www.bps.go.id. The analytical tool used in this study is Modereted Regression Analysis. The results of this study show that significant effects happen in relation of Special Allocation Funds, and Total Assets to Capital Expenditures to Capital Expenditure. Whereas the Original Regional Opinion, General Allocation Funds, and Area Size have no effect on Capital Expenditures. Economic growth variable moderates the relationship between general allocation funds and total assets to Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah Indonesia salah satunya tergantung pada keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik memengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga proses penyusunan daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat

Corresponding author:

¹⁾ anny.widiasmara@gmail.com

penting untuk membantu laju pembangunan di daerah. Adanya pendapatan asli daerah sendiri dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja di daerah. Pendapatan asli daerah ini juga menjadi tolok ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi (Hartanto,2016).

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu daerah sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo (dalam Halim : 225) bahwa apabila pemerintah Indonesia mampu untuk melakukan belanja modal dengan bijaksana, maka diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang luas maka akan lebih membutuhkan pelayanan publik yang lebih banyak, sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Seperti, pembangunan berupa jalan akan mempermudah akses ke suatu daerah dan dapat memperlancar transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri.

Berdasarkan Badan Pusat statistik secara umum realisasi belanja modal pada kurun waktu 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 219,33 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 247,04 triliun rupiah tahun 2015 dan 264,10 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan sebesar 24.60% dibanding tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti bila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun David & Priyo (2007) menyatakan penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya

Sumarmi (2012), Martini (2014), Afkarina (2017), Jaeni dan Anggana (2016), Suryana (2018) dan Jaya dan Dwirandra (2014) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dewi dan Saputra (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian Widyatama (2015), Suryana (2018) menyatakan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Martini (2014), Dewi dan Saputra (2016), Sari dan Wirama (2018) dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Penelitian Suryana (2018), Sari dan wirama (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan sedangkan Dewi dan Saputra (2016) menyatakan bahwa dana alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap belanja modal. Hasil berbeda

diberikan oleh penelitian Martini yang menyatakan bahwa dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada belanja modal.

Berkaitan dengan uraian *gap research* dari beberapa penelitian terdahulu, serta fenomena-fenomena yang ada pada APBD ataupun APBN provinsi di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang belanja modal dan menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Economic growth sebagai variabel moderating Terhadap Belanja Modal Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016.”

Belanja Modal

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sementara, menurut Halim 2007:101 (dalam HP. Gerungan, 2017) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

PAD menurut UU no.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah, semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan desentralisasi. Menurut Halim (2004), Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sumarmi (2012), Martini (2014), Afkarina (2017), Jaeni dan Anggana (2016), Suryana (2018) dan Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_1 : *Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.*

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum(DAU) adalah dana diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negera (APBN), dana ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah-daerah untuk membiayai kebutuhan dimasing-masing pemerintah daerah Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dana dari

pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga dana alokasi umum yang diterima pemerintah difokuskan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan prasaranan. Menurut penelitian Saragih, (2005:84) Dana alokasi umum bersifat block grand yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Apabila DAU suatu pemerintah daerah besar maka pengalokasian belanja modal akan meningkat.

Penelitian Suryana (2018) dan Widyatama (2015) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Kebutuhan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya yang menunjang keperluan publik. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Menurut Rasyid (2006:44) dana alokasi khusus merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*).

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal Ardhani (2011) dalam Wandira (2013).

Rizal (2017), Sari dan wirama (2018) dan Suryana (2018) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_3 :Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Total Aset dan Belanja Modal

Total aset merupakan suatu kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh sekelompok bisnis yang diukur dengan menggunakan satuan uang melalui sistem pengukuran berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Besaran total aset yang dimiliki oleh suatu daerah akan menjadi pertimbangan bagi pemerintahnya dalam mengalokasikan anggarannya bagi belanja modal. Pemerintah daerah yang sudah memiliki aset tetap yang cukup, akan mempertimbangkan pengadaan aset tetap atau infrastruktur dalam alokasi belanjaa modalnya.

Yabsa (2016) menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eka, Akram dan Handayani (2014) yang menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_4 : Total Aset berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Karena itu semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Dodik (2012), Hardiningsih dan Wakhidati (2017) dan Purnama (2014) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5: Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infra struktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa. Setiap Negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau *indicator* yang paling *representative* terhadap perubahan ekonominya. Hal ini tentunya untuk mengetahui unjuk kerja elemen pemerintahan dan semua pihak yang berkepentingan

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan perkapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Gaspersz dan Feonay, 2003; Kuncoro, 2004).

Hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal akan diperkuat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi (Jaeni dan Anggana, 2016)

Jika pendapatan perkapita suatu daerah tinggi, maka Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat akan berkurang. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan memperlemah hubungan dana alokasi umum dan belanja modal. Demikian juga dengan dana alokasi khusus. Adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memperlemah hubungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Antara Pendapatan asli Daerah dengan Belanja Modal

H₇: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

H₈: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

H₉: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara Total Asset dengan belanja Modal

H₁₀: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Luas Wilayah dengan Belanja Modal

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah 34 provinsi pada periode tahun 2014-2016. Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 32 provinsi, kemudian dikalikan 3 tahun periode 2014-2016, sehingga jumlah sampel akhir pada penelitian ini adalah 96 data. Sedangkan data outlier 11 data jadi total adalah 85 data

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variable Dependen, yaitu Belanja Modal (Y)
2. Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli daerah (X1), dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Total Aset (X4) dan Luas Wilayah (X5)
3. Variabel Moderasi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Z)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan penelitian pustaka. Data-data tersebut diperoleh dari situs resmi pemerintah yang telah diterbitkan secara online dalam penelitian ini mengambil dari BPS sesuai periode tahun penelitian 2014-2016.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian menggunakan *Moderating Regression Analysis* yaitu peramaan *regresi linier berganda* dengan model *quasi moderating* dengan basis interaksi yaitu menggunakan dua variabel independen, satu variabel moderasi, dan satu variabel dependen dinyatakan dalam persamaan berikut

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 TA + \beta_5 LW + \beta_6 PAD_PE + \beta_7 DAU_PE + \beta_8 DAK_PE + \beta_9 TA_PE + \beta_{10} LW_PE + \varepsilon$$

Dimana :

BM	=	Belanja Modal
α	=	<i>Intercept</i> / Konstanta
$\beta_1 - \beta_{10}$	=	Koefisien regresi
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
TA	=	Total Aset
LW	=	Luas Wilayah
PAD_PE	=	interaksi PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi
DAU_PE	=	interaksi Antara DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi
DAK_PE	=	interaksi Antara DAK dengan pertumbuhan Ekonomi

TA-PE	=	interaksi Antara Total Asset dengan pertumbuhan ekonomi
LW_PE	=	interaksi Antara luas wilayah dengan pertumbuhan ekonomi
ε	=	standar <i>error</i>

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji t dan uji F. Untuk uji asumsi klasik maka digunakan uji normaitas dengan menggunakan Kolmogorov smirnov, uji heteroskedastisitas dengan uji glejser, uji multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan Variance in Factor (VIF), sedangkan autokorelasi dengan melihat nilai durbin Watson.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	85	18.56	23.56	21.0898	1.13347
DAU	85	19.04	21.64	20.7992	.33076
DAK	85	15.60	22.75	18.8269	1.44315
TA	85	20.99	25.59	22.3401	.86457
LW	85	8.05	12.67	10.4275	.99212
PAD_PE	85	16.43	22.37	18.9834	1.29427
DAU_PE	85	15.04	20.32	18.6934	.84386
DAK_PE	85	13.19	20.88	16.7211	1.61574
TA_PE	85	17.65	23.68	20.2339	1.09955
LW_PE	85	5.27	11.65	8.3215	1.22606
BM	85	19.25	21.78	20.4615	.65540
Valid N (listwise)	85				

Dari table 1 di atas dapat kita lihat nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi dari variable penelitian yang terdiri atas variable Pendapatan Asli daerah, dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, Total Assets, luas Wilayah, Interaksi Antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi, interaksi Antara DAU dan Pertumbuhan Ekonomi, interaksi Antara DAK dan pertumbuhan Ekonomi, interaksi Antara total assets dan pertumbuhan ekonomi, interaksi Antara Luas Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji asumsi klasik untuk melihat data penelitian ini terdapat penyimpangan atau tidak. Setelah data dinyatakan lolos uji asumsi klasik, langkah selanjutnya dilakukan uji ketepatan model berupa uji koefisien determinasi dan uji signifikansi F

Tabel 2.
Hasil Uji Ketepatan Model

Keterangan	Hasil
R square	0,762
Adjusted R Square	0,740
Sig F	0,000

Dari hasil uji ketepatan model, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square nya adalah 0,740 yang artinya variable independen dalam penelitian ini mempengaruhi variable dependen sebesar 74% sedangkan sisanya dijelaskan oleh factor lain. Kemudian nilai signifikansi dai ujiF sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model layak.

Hasil Moderating Regression Analysis (MRA)

Hasil dari uji regresi yang menggunakan *Moderating Regression Analysis* sebagai berikut:

Tabel. 3
Hasil Uji Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.290	2.400		1.371	.174
PAD	-1.612	.182	-.160	1.612	.111
DAU	.316	.176	.160	1.797	.076
DAK	.073	.026	.160	2.781	.007
TA	.602	.069	.794	8.680	.000
LW	-.444	-.052	-.446	-.456	.650
PAD PE	-.007	.051	-.014	-.140	.889
DAU PE	-.248	.121	-.319	-2.038	.045
DAK PE	.048	.033	.119	1.485	.142
TA PE	.642	.086	1.077	7.464	.000
LW PE	.049	.038	.092	1.280	.205

Dari hasil regresi di atas maka diperoleh persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = 3,290 - 1,612PAD + 0,316 DAU + 0,073DAK + 0,602TA - 0,444LW - 0,007PAD_PE - 0,248DAU_PE + 0,048DAK_PE + 0,642TA_PE + 0,049LW_PE + \epsilon$$

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing variable. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada table 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T	Sig	keputusan
PAD	1.612	.111	H1 Ditolak
DAU	1.797	.076	H2 Ditolak
DAK	2.781	.007	H3 Diterima
TA	8.680	.000	H4 Diterima
LW	-.456	.650	H5 Ditolak
PAD_EG	-.140	.889	H6 Ditolak
DAU_EG	-2.038	.045	H7 Diterima
DAK_EG	1.485	.142	H8 Ditolak
TA_EG	7.464	.000	H9 Diterima
LW_EG	1.280	.205	H10 Ditolak

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan arah pengaruh positif yaitu sebesar 1.612 dengan nilai signifikansi 0,111. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau $(0,111 > 0,05)$ artinya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Jika H_1 menjelaskan bahwa PAD positif signifikan maka **ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Besar kecilnya nilai pendapatan Asli Daerah ternyata tidak mempengaruhi nilai belanja modal pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang penting sebagai pendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Maka dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, pemerintah akan mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal tanpa memperhatikan besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel dana alokasi umum menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar 1.797 dengan nilai signifikansi 0,076. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau $(0,076 > 0,05)$ artinya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini **ditolak**.

Tidak berpengaruhnya nilai dana alokasi umum terhadap belanja modal dikarenakan DAU yang bersifat umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Sehingga besar kecilnya nilai Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi nilai alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel dana alokasi khusus menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar 2.781 dengan nilai signifikansi 0,007. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau $(0,007 < 0,05)$ artinya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jika H_3 menjelaskan bahwa DAK positif signifikan maka **diterima**. Sehingga dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pengaruh Total Aset Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel total aset menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar 8.680 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ artinya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini **diterima**. Yang artinya total aset berpengaruh terhadap belanja modal.

Jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah akan menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengalokasikan belanja modalnya. Jika aset yang dimiliki oleh pemerintah banyak berupa aset tetap tentu pemerintah tidak lagi mengalokasikan belanjanya kepada aset tetap. Sehingga total aset berpengaruh pada alokasi belanja modal.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel luas wilayah menunjukkan pengaruh negatif yaitu sebesar $-0,456$ dengan nilai signifikansi $0,650$. Nilai signifikansi lebih dari $0,05$ atau ($0,650 > 0,05$) artinya menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Jika H_5 menjelaskan bahwa Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal **ditolak**. Artinya luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Alokasi belanja modal pemerintah tidak hanya memperhatikan luas wilayah pemerintah, tetapi juga melihat skala prioritas. Sehingga walaupun suatu pemerintah memiliki wilayah yang luas bukan berarti pemerintah akan mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal. Pemerintah harus melihat kebutuhan yang paling penting dalam daerahnya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan DAU dan TA terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel DAU menunjukkan pengaruh negatif yaitu sebesar $-2,038$ dengan nilai signifikansi $0,045$. Nilai signifikansi kurang dari $0,05$ atau ($0,045 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi **dapat memoderasi** Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. serta hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel Total aset (TA) menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar $7,464$ dengan nilai signifikansi $0,000$. Nilai signifikansi kurang dari $0,05$ atau ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi **dapat memoderasi** Total Aset (TA) terhadap belanja modal.

Sedangkan Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan PAD, DAK, LW terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel PAD menunjukkan pengaruh negatif yaitu sebesar $-0,140$ dengan nilai signifikansi $0,889$. Nilai signifikansi lebih dari $0,05$ atau ($0,889 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi **tidak dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wirama (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel DAK menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar $1,485$ dengan nilai signifikansi $0,145$. Nilai signifikansi lebih dari $0,05$ atau ($0,145 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi **tidak dapat memoderasi** Dana alokasi Khusus (DAK) dengan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wirama (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan Antara Dana Alokasi Khusus dengan belanja modal. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi khusus dalam belanja modal. Hal ini karena dana alokasi khusus pemanfaatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t pada variabel LW menunjukkan pengaruh positif yaitu sebesar $1,180$ dengan nilai signifikansi $0,205$. Nilai signifikansi lebih dari $0,05$ atau ($0,205 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan

bahwa Pertumbuhan Ekonomi **tidak dapat memoderasi** Luas Wilayah (LW) dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan luas wilayah dengan belanja modal karena pengadaan belanja modal dari suatu pemerintah daerah harus melihat manfaat dan kebutuhan dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu daerah bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan belanja modal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-ha; sebagai berikut:

1. Variabel yang berpengaruh signifikan adalah, Dana Alokasi Khusus, dan Total Aset terhadap Belanja Modal.
2. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Variabel *Economic growth* memoderasi hubungan DAU dan TA terhadap Belanja Modal

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang ingin dikemukakan antara lain: Diharapkan penelitian yang akan datang untuk menggunakan sampel dari sektor kecamatan dengan menggunakan tehnik yang berbeda, seperti *time series* atau kuartal, juga tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian lebih dapat merealisasikan kondisi pada seluruh kecamatan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih, Pancawati Dan Wakhidati, Indri Nur. 2017. Karakteristik Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pemoderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Mei 2017, Hal: 53- 66
- Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1)
- Andi. Martini . 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 1. No 1. Hal 1-15.
- Dewi, Ni Wayan Ratna Dan Suputra, I Dewa Gede Dharma. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. Maret (2017): 1745-1773.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
- Hartanto 2016, *Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Upaya Memperkuat Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sleman*

- Jaeni dan anggana, Greg, 2016 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal, *Dinamika Akuntansi, Akuntansi Dan Perbankan*, Mei 2016 Hal 13-26 , ISSN :1979-4878, vol 5 no 1
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika Dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
- Rasyid, M. Ryaas. 2006 *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Republik Indonesia,
- Saragih, Juli Panglima. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia
- Sari, Desak Made Mya Yudia Dan Wirama, Dewa Gede. 2018. Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal Dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.3. Maret (2018): 2065-2087 *Doi: <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P16>*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarmi. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. *E- Journal Bisma*. Vol 2. No 1. Hal 1-17.
- Suryana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* – Vol 9 No 2 September 2018: 67-75
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Widyatama, Kuncahyo. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah). Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.